




## Meneroka Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Gereja dan Masyarakat Toraja

Johana Ruadjanna Tangirerung<sup>1</sup>, Judith D. L Wangania<sup>2</sup>, Meike Roselyna Tapparan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Kristen Indonesia Toraja, Sulawesi Selatan

<sup>2,3</sup>Sekolah Tinggi Filsafat Teologi INTIM, Makassar, Sulawesi Selatan

### Correspondence:

[jrtangirerung@ukitoraja.ac.id](mailto:jrtangirerung@ukitoraja.ac.id)

### DOI:

<https://doi.org/10.30995/kur.v10i2.826>

### Article History

Submitted: Oct. 24, 2023

Reviewed: Feb. 02, 2024

Accepted: August 30, 2024

### Keywords:

church of Toraja;  
gender justice;  
gender equality;  
gender literacy;  
Toraja society;  
gereja Toraja;  
keadilan gender;  
kesetaraan gender;  
literasi gender;  
masyarakat Toraja

Copyright: ©2024, Authors.

### License:



**Abstract:** Toraja society, which has a bilateral kinship system, accommodates matriarchal and patriarchal systems. This system has elements of equality. However, church and community life phenomena are still less visible, especially regarding leadership. This paper will further explore the existence of women in broader leadership through the historical experience of leadership in the Toraja Church. The method used is qualitative descriptive by presenting various realities of injustice from multiple surveys in general and the history of the leadership of the Toraja Church itself in accepting women as church officials. The discussion results are various causes of injustice, namely the influence of theological understanding from Zending, who came to Toraja, and the influence of patriarchal ideology. The conclusion is that it is necessary to continuously carry out gender literacy to the church and community regarding equality.

**Abstrak:** Masyarakat Toraja yang sistem kekerabatannya bilateral, mengakomodasi baik sistem matriarkar maupun patriarkar. Sistem ini sejatinya memiliki unsur kesetaraan. Namun melihat fenomena dalam kehidupan gereja dan masyarakat, masih kurang terlihat, khususnya terkait kepemimpinan. Tulisan ini akan meneroka lebih jauh keberadaan perempuan dalam kepemimpinan yang lebih luas melalui pengalaman sejarah kepemimpinan dalam Gereja Toraja. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengemukakan berbagai realitas ketidakadilan dari berbagai survei secara umum dan realitas dalam sejarah kepemimpinan Gereja Toraja sendiri dalam menerima perempuan menjadi pejabat gerejawi. Hasil pembahasan adalah ditemukan berbagai sebab ketidakadilan yaitu pengaruh pemahaman teologi dari Zending yang datang ke Toraja dan pengaruh ideologi patriarkalisme. Riset ini menyimpulkan, perlunya terus-menerus melakukan literasi gender kepada gereja dan masyarakat terkait kesetaraan.

## Pendahuluan

Budaya Toraja pada dasarnya memiliki nilai yang dipraktekkan dalam kehidupan untuk selalu memiliki perspektif kesetaraan. Letak dan tata kosmos sangat mempertimbangkan keseimbangan. Konsep *tallulolona*, *a'pa' tauninna* merupakan pengaturan kehidupan yang mempertimbangkan keseimbangan antara *tallu lolo* (*tallu* = tiga; *lolo* = pucuk/symbol kehidupan). Tiga pucuk itu adalah manusia, hewan dan tanaman. *A'pa' tauninna* (*a'pa'* = empat; *tauninna* = unsur) adalah empat unsur yang perlu ada dalam kehidupan manusia, yaitu air, tanah,

kayu dan besi.<sup>1</sup> Konsep ini bagi Sam Barumbun merupakan konsep kesetaraan atau keseimbangan yang kemudian seluruh tatanan nilai, perlakuan dan tindakan orang Toraja dilandaskan pada konsep global ini. Perlakuan yang seimbang akan melahirkan keharmonisan, sementara perlakuan tidak seimbang akan melahirkan ketidakharmonisan. Begitupun dalam melihat manusia laki-laki dan Perempuan. Terdapat sejumlah simbol yang memproyeksikan kesetaraan tersebut, misalnya rumah adat/*tongkonan*, simbol dari Ibu dan lumbung/*alang*, sebagai ayah.<sup>2</sup> Ibu dan ayah dalam geokulture tradisional budaya Toraja adalah setara. Tentu sedikit banyak ini juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan bilateral dari suku Toraja.

Perkembangannya kemudian, dalam berkebudayaan, manusia menciptakan perbedaan-perbedaan berdasarkan kedudukan dan peran dalam masyarakat. Perbedaan tersebut termanifestasi dalam pemikiran, tindakan atau perlakuan. Pemikiran, perilaku dan tindakan yang melihat manusia khususnya manusia laki-laki dan perempuan secara tidak setara, dimana laki-laki dilihat lebih baik dari perempuan, atau sebaliknya. Perlakuan mengenai fungsi, peran dan kedudukan perempuan mengalami perubahan, seiring perkembangan zaman. Perempuan tergeser semata ditugasi peran domestik dan laki-laki peran publik. Penekanan fungsi domestik dan publik ini menjadi akar dimana perempuan mengalami peminggiran dari peran-peran publik termasuk dalam kepemimpinan gereja di lingkup yang lebih luas. Apalagi jika kemudian seolah-olah “dilegitimasi” oleh teks-teks “diskriminatif” atau bahkan teologi tertentu.

Dalam terminologi biblis dapat ditemukan beberapa teks-teks “diskriminatif” yang dimaksud. Rasul Paulus misalnya dalam beberapa suratnya menempatkan pengajarannya yang “tidak adil” dalam melihat dan memperlakukan serta memberi peran pada perempuan. Surat Paulus dalam 1 Timotius 2:11-12 mengatakan agar perempuan berdiam diri saja mendengar ajaran dan tidak diizinkan mengajar serta tidak boleh memerintah laki-laki. Kepada Jemaat di Korintus, Paulus juga menekankan hal yang sama, berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, nanti di rumah baru tanya kepada suami (1Kor.14:34-35). Pertanyaannya kemudian adalah apakah akarnya dari Alkitab atau teologi?

Kesetaraan sesungguhnya adalah terminologi yang akrab sekali dalam kekristenan. Kitab Kejadian 1:26 mengatakan, “Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.” Letak kesetaraan dalam teks ini adalah kesegambaran dan keserupaan dengan Allah, yaitu sifat dan karakter, bukan fisiknya. Jadi kesetaraan dalam perspektif penciptaan adalah manusia laki-laki dan perempuan itu adalah setara dalam menerima dan mengekspresikan kedirian sebagai gambar dan rupa Allah.<sup>3</sup> Bukankah rupa Allah itu baik dan ketika Allah usai menciptakan semua hal, termasuk manusia. Ia menegaskan bahwa semua itu baik adanya. Manusia laki-laki dan perempuan adalah setara dalam rupa dan kesegambarannya dengan Allah. Kesetaraan itu dapat dikatakan sebagai tugas misi penciptaan.

Craig S Keener mengelaborasi seluruh teks-teks “diskriminatif” terhadap perempuan. Buku ini menjelaskan secara rinci bagaimana sesungguhnya pandangan Paulus terhadap

<sup>1</sup> Wawancara dengan Samuel Barumbun di Nanggala, 5 Oktober, 2023.

<sup>2</sup> Johana R Tangirerung, Selvi Panggua, and Dina Gasong, “Menemukan Nilai-nilai Kesetaraan Gender dibalik Metafora Simbolik Rumah Adat ‘Tongkonan’ dan Lumbung ‘Alang’ Toraja,” *Prosiding Seminar Nasional SMIPT 2020 Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, vol. 3, no. 1, (2020): 404-415..

<sup>3</sup> Lynne Marie Kohm, “A Christian Perspective on Gender Equality,” *Duke Journal of Gender Law & Policy* 15 (2008): 339-364.

perempuan dalam pelayanan dan gereja.<sup>4</sup> Keener pada akhirnya menyadari bahwa teks-teks “diskriminatif” di atas itu bukan sekadar persoalan penutup kepala, dan kehadiran dalam pertemuan-pertemuan umum, namun lebih pada persoalan spesifik dalam jemaat dan budaya. Demikian halnya dengan B.F Drewes, ketika penulis mewawancarinya dalam penulisan disertasi di Universitas Leiden, Belanda. Drewes mengatakan bahwa teks-teks “diskriminatif” tersebut “bermasalah” karena tiga alasan, yaitu ada masalah eksegetis, konteks historis Yahu-di dan Helenis yang kompleks, dan soal hermeneutis.<sup>5</sup> Luise Schottroff, malah mengatakan bahwa Perjanjian baru merupakan sumber kisah-kisah perempuan.<sup>6</sup> Lalu, mengapa seolah-olah Alkitab melegitimasi ketidaksetaraan? Titik masalahnya ada pada proses interpretasi dan rekonstruksi. Gerakan feminis rekonstruksionis menawarkan cara membaca dan menafsir secara baru, dalam hal ini dari perspektif teologi feminis.

Sejarah Gereja Toraja awal, selama beberapa dasawarsa menganut beberapa teks-teks diskriminatif di atas, dan menempati ruang dalam bergereja. Perempuan tidak punya hak suara dan hak bicara dalam pertemuan-pertemuan gerejawi. Pengaruh langsung dari teologi ini adalah peraturan Gereja Toraja yang masih berkiblat ke gereja Hervorm, tidak menerima perempuan sebagai pejabat gereja. Setelah digumuli Selma 37 tahun, pada Persidangan Sinode VII diputuskan bahwa perempuan dapat diterima sebagai pejabat gerejawi (penatua, diaken dan pendeta).

Meskipun berbagai kebijakan dan dokumen gereja cukup banyak membicarakan hak-hak perempuan sejak tahun 1984 hingga kini, namun realitasnya tetap terasa ada diskriminasi dan ketidakadilan bagi perempuan. Pengakuan dan bahkan legal formal yang mengakomodasi Perempuan dalam pelayanan dan struktur gereja tidak cukup kuat memengaruhi sistem, pandangan dan tindakan kesetaraan. Pemahaman kesetaraan itu belum menubuh dalam sistem dan metabolisme bergereja. Ketidakmenubuhan ini barangkali disebabkan oleh karena lamanya teologi dan ideologi patriarkalisme menghuni seluruh kerangka pikir dan berbudaya manusia. Pada saat yang sama, pemahaman gender dan kesetaraan juga masih sangat minim dipahami umat dan masyarakat secara umum. Pada titik inilah terjadi ketimpangan gender yang tentu menuai ketidakadilan bagi gender tertentu.

Menengarai latar belakang yang dikemukakan ini, maka argumentasi penulis ialah, tidak cukup sekadar pengakuan legal formal terkait pengakuan dan legasi hukum, namun dibutuhkan sebuah kesadaran yang utuh dan mendalam mengenai kompleksnya persoalan ketidakadilan gender dalam gereja dan Masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut, tulisan ini akan mendeskripsikan realitas ketidaksetaraan dan kesetaraan gender secara lebih luas berdasarkan konteks dan sejarah Gereja Toraja, yang tidak menerima perempuan menjadi pejabat gerejawi selama 37 tahun dan dampaknya sampai sekarang dalam kepemimpinan gereja secara luas.

## **Ketimpangan Gender dalam Masyarakat dan Gereja**

Ketimpangan gender dapat dibaca melalui riset yang dilakukan oleh United Nation Development Programme (UNDP) yang memperkenalkan *gender inequality index* (GII) sebagai ukuran

---

<sup>4</sup> Craig S Keener, *Paul, Women & Wives: MAriage Anda Women's Ministry in The Letters of Paul*. (Hendickson publishers, 1995), 5.

<sup>5</sup> Johana Ruadjanna Tangirerung, “Studi Teologi Feminis Atas Peran Dan Kedudukan Perempuan Pendeta dalam Menyikapi Fenomena Glass Ceiling untuk Merevitalisasi Panggilan Misioner Gereja Toraja,” *Disertasi* (Cipanas: STT Cipanas, 2018), 38-39

<sup>6</sup> Luise Schottrof, Silva Schorer, and Marie- Theres Wacker, *Feminis Interpretation: The Bible in Women's Perspective* (Mineapolis: Fortress Press, 1999), 179.



dan psikis, serta kekerasan sosial. Perlakuan kekerasan ini lebih banyak dilakukan oleh orang terdekat. Di bawah ini adalah infografis yang menggambarkan bagaimana kekerasan seksual mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2006-2019 menurut CATAHU<sup>12</sup> dan catatan Tempo tahun 2022.<sup>13</sup>

Gambar 4 Perempuan Korban Kekerasan



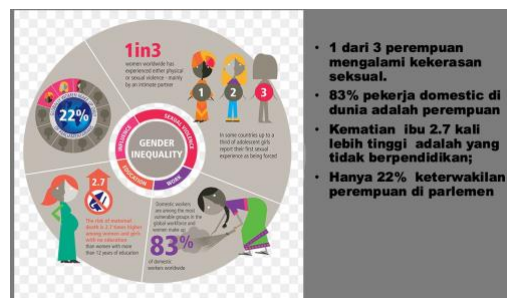
Sumber: CATAHU Komnas Perempuan

Gambar 5 Korban dan Pelaku Kekerasan



Sumber: Tempo

Informasi dari CATAHU tahun 2022, yang merupakan rangkaian catatan dari pelaporan kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2021 mencatat peningkatan korban. Laporan ini memiliki catatan spesifik terkait pandemic Covid-19. Ini menjadi konteks baru yang menambah kasus-kasus kekerasan.<sup>14</sup> Konteks ini tentu menjadi persoalan besar negeri ini. Jika kita tidak memiliki kepekaan tersebut, maka sulit bagi Indonesia untuk pencapaian kesetaraan atau penurunan ketimpangan gender. Di bawah ini merupakan fakta dari ketimpangan gender di Indonesia.<sup>15</sup>



Gambar 6: Kesimpulan Ketimpangan Gender

Bukan hanya di dalam masyarakat secara umum, di ranah gerejapun ketimpangan gender terhadap perempuan masih terlihat. Gereja Toraja adalah salah satu gereja yang lahir dari proses Pekabaran Injil dari *Gereformeerd Zendingsbond* (GZB). GZB ini merupakan badan misi independen di Belanda yang tidak berada langsung di bawah pemerintah Belanda. Badan misi

<https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/05445101/komnas-perempuan-34682-perempuan-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-2024>.

<sup>12</sup> Komnas Perempuan, "CATAHU Komnas Perempuan," *Komnas Perempuan* (Jakarta, 2020), accessed August 19, 2024, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/info-grafis-catahu-2020-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>.

<sup>13</sup> Tempo, "Infografis Kekerasan Terhadap Perempuan," 2022, accessed August 19, 2024, <https://grafis.tempo.co/>.

<sup>14</sup> "Catatan Tahunan," *Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, accessed February 4, 2022, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>.

<sup>15</sup> <https://www.kempppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-kesetaraan-gender-dan-memberdayakan-kaum-perempuan>

ini sangat dipengaruhi oleh aliran Pietis tertentu di Belanda yang salah satu ajarannya ialah tidak memperkenankan perempuan menjadi pejabat gerejawi.

Setelah Gereja Toraja mandiri, gereja ini terus bergumul tentang kehadiran perempuan dalam struktur dan sistem pelayanan gereja. Selama itu perempuan tidak memiliki hak suara dan hak bicara dalam gereja. Nanti pada tahun 1984 barulah Gereja Toraja memutuskan secara resmi dalam Sidang Sinode ke-7 di Palopo untuk menerima perempuan dalam jabatan gerejawi. Perjalanan panjang Gereja Toraja memperjuangkan kehadiran perempuan dalam gereja memang telah terwujud, namun cakar pengaruh teologi yang bercorak patriarkalisme itu telah tertancap begitu dalam. Akibatnya, secara laten membentuk *mindset* bagi warga gereja, baik laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Memori bawa sadar kita telah terisi teologi bercorak patriarkalisme. Laki-laki masih “belum rela” memberikan ruang yang cukup luas bagi perempuan baik dalam keterlibatan strategis pengambilan keputusan-keputusan maupun dalam tataran praktis. Perempuan sendiri mengalami inferioritas aktualisasi diri baik dalam tataran praktis di dalam rumah tangga dan masyarakat terkait peran, maupun dalam struktur kepemimpinan gereja.<sup>16</sup> Andreas J Anggui mengatakan kepemimpinan perempuan khususnya dalam jabatan gerejawi yang merupakan hak gerejawi setiap orang, namun diberikan dengan cara dicicil bagi perempuan.<sup>17</sup>

Cicilan pertama “hak memilih”, pada tahun 1947 ketika Gereja Toraja berdiri, aturan gereja sesuai keputusan I tahun 1947 diatur bahwa hak memilih dan dipilih dalam jabatan gerejawi hanya ada pada laki-laki. Nanti pada Sidang Sinode V tahun 1955 barulah diputuskan bahwa perempuan dapat memilih pejabat khusus gerejawi yaitu Penatua, Diaken dan Pendeta, TETAPI tidak dapat dipilih. Cicilan kedua 1978, “hak berkhotbah”. Komisi Tata Gereja yang dibentuk dalam Sidang Sinode Am (SSA) XIV di Makassar tahun 1975, membicarakan mengenai perempuan dalam jabatan gerejawi agar dapat dipilih. Meskipun panas dan alot pembicaraan tersebut, hal yang dapat disetujui ialah berkhotbah. Sidang itu menyetujui bahwa perempuan baik yang sarjana teologi, maupun yang mempunyai bakat/karunia dan bersedia, diperkenankan melayani kebaktian ditengah-tengah jemaat setelah disetujui oleh majelis gereja. Cicilan ketiga “Hak Dipilih” 1981. Komisi Tata Gereja Toraja (TGT) dibentuk di Makassar tahun 1975 masih terus menggeluti isu “hak Perempuan” yang kemudian diusulkan dalam SSA tahun 1981, tapi masih belum diterima. Tetapi yang cukup menggembarakan ialah ditetapkannya wakil *ex officio* pengurus Organisasi Intra Gereja menjadi bagian dari Komisi Usaha Gereja Toraja (KUGT), di mana Ibu A. Lebang sebagai Ketua PWGT dan Ibu G.S Kobong sebagai wakil dari Sekolah Minggu. Cicilan keempat, tahun 1984. Rancangan TGT dalam SSA 1981 memuat hak gerejawi perempuan yang masih ditolak, diajukan kembali di persidangan di Palopo tahun 1984. Persidangan itu sangat alot dan panas, di mana masih terjadi penolakan, baik dari Indonesia sendiri maupun dari pihak GZB yang masih memantau perjalanan Gereja Toraja dari sidang ke sidang. Setelah melalui perdebatan keras dan alot itu, akhirnya SSA XVII Palopo memutuskan untuk menerima perempuan dalam jabatan gerejawi dalam semua jabatan yaitu pendeta, diaken dan penatua.

Sejak saat itu Keputusan SSA XVII mendapat sambutan yang positif dari berbagai jemaat. Pencalonan perempuan sebagai majelis gereja dalam jabatan Penatua dan Diaken semakin banyak. Namun penahbisan perempuan menjadi pendeta masih mengalami pelambatan.

---

<sup>16</sup> Tangirerung, “Studi Teologi Feminis atas Peran dan Kedudukan Perempuan Pendeta dalam Menyikapi Fenomena Glass Ceiling untuk Merevitalisasi Panggilan Misioner gereja Toraja.”

<sup>17</sup> Andreas J Anggui, “Memburu Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki dalam Perjalanan Gereja Toraja’ dalam *Bukan Gereja Laki-laki: Dua Puluh Lima Tahun Perempuan Pendeta Gereja Toraja (1986-2011)*,” (Rantepao: Penerbit Lolo, 2011). 21-36.

Nantilah pada tahun 1986, dua tahu setelah disahkannya keputusan menerima perempuan dalam semua jabatan gerejawi, barulah perempuan ditahbiskan atau diurapi menjadi pendeta. Perempuan pertama yang dicatat sejarah gereja Toraja yang diurapi menjadi pendeta adalah Ibu Damaris M Anggui, tahun 1986. Menyusul Ibu Ribka Sinda di Jemaat Bua pada bulan Mei 1986, dan kemudian Pdt. Dina Toding pada tahun 1988. Setelah itu jumlah perempuan pendeta di Gereja Toraja meningkat secara signifikan. Penelitian Johana R Tangirerung mengemukakan data yang diperoleh dari BPS Gereja Toraja memperlihatkan jumlah perempuan pendeta setelah tertinggal 39 tahun dari laki-laki, hampir menyamai jumlah laki-laki yang menjadi pendeta. Tangirerung mengemukakan bahwa sampai pada tahun 2016 jumlah perempuan pendeta 378 dan laki-laki 625 orang. Peningkatan itu mencapai 44.6% jika dihitung dari ketinggalannya 39 tahun sejak Gereja Toraja berdiri tahun 1947, sementara perempuan diterima menjadi pendeta baru tahun 1986.<sup>18</sup>

Perjuangan mencapai kesetaraan dalam gereja tidak berhenti sampai disitu saja, karena ternyata diterimanya perempuan secara legal formal, tidak serta merta berbanding lurus dengan perkembangan pemahaman kesetaraan dalam pola pikir dan *mindset* baik perempuan maupun laki-laki. Di bawah ini gambaran sejarah kepemimpinan Gereja Toraja, yang cukup jelas memperlihatkan ketimpangan/kesenjangan perempuan dan laki-laki. Perempuan dalam sejarah kepemimpinan Gereja Toraja hampir tidak pernah menduduki posisi pemegang kebijakan dalam struktur di Sinode. Sepertinya belum percaya bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin struktural di tingkat Sinode. Kalaupun ada, itu karena kesadaran sesaat untuk tidak dikatakan “kok tidak ada perempuan di struktur”. Akhirnya selalu diberikan pada posisi bendahara atau salah satu ketua.

	1984-1988	1988-1992	1992-1996	1996-2001	2001-2006	2006-2011	2011-2016	2016-2021	2021-2026
Ketua Umum	Pdt. A.J. Anggui, M.Th	Pdt. A.J. Anggui, M.Th	Pdt. Dr. I.P. Landa*	Pdt. Dr. I.P. Landa*	Pdt. Solomoni Batti, M.Th	Pdt. Solomoni Batti, M.Th	Pdt. Solomoni Batti, M.Th	Pdt. Solomoni Batti, M.Th	Pdt. Dr. A. Y. B. Rindopadang, M.Th
Ketua 1	Pdt. M. Yasi Dera, S.Th	Pdt. M. Yasi Dera, S.Th	Pdt. M. Yasi Dera, S.Th	Pdt. M. Yasi Dera, S.Th	Pdt. Henriette Harnomati-Lobang, Ed.D.	Pdt. Y. Paungalo, Dr. Th	Pdt. Dr. Afrid Yohanes Rantadaru, M.Th	Pdt. Dr. Afrid Yohanes Rantadaru, M.Th	Pdt. Dr. Afrid Yohanes Rantadaru, M.Th
Ketua 2	Pdt. Y. Dama, S.Th	Pdt. Paulus Patandak, S.Th	Pdt. P. Patandak, S.Th	Pdt. J.K. Patandak, M.Th	Pdt. Des. D. P. Sumbung, S.Th	Pdt. Daniel Rasi, S.Th, M.M	Pdt. Yohanes Bawang, S.Th, M.M	Pdt. Mar Sumbung, M.Th	
Ketua 3	Pdt. Paul. Patandak, S.Th	Prof. Prof. Des. Sumbung	Sym. D. Tualak, SE	Prof. Dr. F. P. Sumbung, M.Sc.	Prof. Dr. F. P. Sumbung, M.Sc.	Prof. Dr. Daniel Sumpayung, S.Pb (S)	Prof. Dr. Daniel Sumpayung, S.Pb (S)	Prof. Dr. Daniel Sumpayung, S.Pb (S)	Prof. Dr. Daniel Sumpayung, S.Pb (S)
Ketua 4							Pdt. Asiatu Kalanga, M.Th	DR. Ir. Adikusum Pasudena	Pdt. Dr. Thero Kesatuan Salanga, M.Th
Ketua 5								Pdt. Asiatu Kalanga, M.Th	Pdt. Yus Pallung, M.Th
Sekretaris	Pdt. Paul. Patandak, S.Th	Pdt. Des. A. J. B. Rindopadang	Pdt. Des. D. P. Sumbung	Pdt. Solomoni Batti, M.Th	Pdt. M. Yasi Dera, S.Th	Pdt. Solomoni Allo Linggi, M.Si	Pdt. Solomoni Allo Linggi, M.Si	Pdt. Solomoni Allo Linggi, M.Th	Pdt. Dr. Chirras Tundak, M.Th
Wakil sekretaris	Des. A. Y. B. Rindopadang	Pdt. Des. A. J. B. Rindopadang	Pdt. Steven S. Bassa	Stephen Sunda Bassa	Pdt. Levi Rindom, SH	Pdt. Agustinus	Pdt. Levi Rindom, SH	Pdt. Levi Rindom, SH	Dka. Yohanes Banna Parika, S.K.M
Bendahara	Des. A. Y. B. Rindopadang	Symas Des. D. Tualak	Des. A. J. B. Rindopadang	Des. Yovani Paratte	Pdt. Des. Yovani Paratte	Pdt. Korantus Tombi, SE	Pdt. Korantus Tombi, SE	Pdt. Katrinus Tombi, SE	Pdt. Eval Popong

Sumber: Hasil Keputusan Persidangan Sinode Gereja Toraja, Tahun 2021

**Gambar 7: Kepemimpinan Sinode dari periode ke periode**

Gambar di atas memperlihatkan bahwa sejak berdiri tahun 1947, Gereja Toraja memiliki sejarah panjang dalam menggumuli kehadiran perempuan secara penuh dalam gereja. Kotak yang berwarna kuning adalah laki-laki dan kotak yang berwarna pink adalah perempuan dalam struktur Gereja Toraja sepanjang periode kepemimpinan.

### Glass Ceiling: Sebuah Hambatan Tersembunyi

Secara legal formal, bahkan dalam tataran teologi perempuan sudah diberi ruang. Keputusan SSA VII di Palopo telah membukan pintu bagi perempuan untuk diterima sebagai pejabat gerejawi. Pemerintah melalui UU No 12 Tahun 2003, kemudian ditegaskan lagi dalam UU No

<sup>18</sup> Tangirerung, “Studi Teologi Feminis atas Peran dan Kedudukan Perempuan Pendeta...”, 129.

10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Ayat 1 dari pasal 65 menegaskan bahwa setiap partai politik yang lolos sebagai kontestan Pemilu di tiap jenjang mulai dari Kabupaten/Kota wajib memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.<sup>19</sup> Isti'anah ZAI dan Ani Yunita dalam penelitian mereka menyebutkan bahwa sepanjang aturan tersebut disahkan, keterwakilan perempuan 30% belum pernah tercapai.<sup>20</sup> Di bawah ini adalah tabel yang dikemukakan Isti'anah, dkk yang memperlihatkan data bahwa keterwakilan perempuan 30% di Parlemen tidak pernah tercapai:

**Tabel 1 Representasi Keterwakilan Perempuan di DPR RI dan DPD RI Periode 2004-2024**

Periode	Lembaga	Perempuan	Laki-laki	% Perempuan
2004-2009	DPR RI	65	495	11,82%
2009-2014	DPR RI	101	459	17,86%
2014-2019	DPR RI	97	463	17,32%
2019-2024	DPR RI	118	467	20,52%
2004-2009	DPD RI	27	101	21,9%
2009-2014	DPD RI	35	97	26,52%
2014-2019	DPD RI	34	98	25,76%
2019-2024	DPD RI	42	136	29,88%

Sumber: <https://media.neliti.com/media/publications/477134-none-865a1dae.pdf>

Pada gambar 7 juga memperlihatkan bahwa betapa dalam Sejarah Kepemimpinan Gereja Toraja yang lebih luas, memilih Perempuan untuk jabatan struktural masih minim. Menduduki jabatan struktural mungkin di bawah 10%, dan menjadi "top leader" atau Ketua Umum, 0%. Tujuannya mengangkat data ini adalah untuk memperlihatkan bahwa perlu kajian lebih jauh mencari sebab dan faktor-faktor apa yang membuat perempuan begitu sulit menempati posisi ketua "top leader".

Secara teologis dan eklesiologis landasannya jelas, tandas Mary L. Kategile bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama sebagai gambar dan rupa Allah (Kej.1:28). Kesegambaran dan keserupaannya terletak pada harkat dan martabat yang diletakkan Allah kepada Adam dan Hawa dan diberi tugas yang sama yaitu sebuah tanggungjawab kolektif. Lebih jelasnya Kategile menjelaskan demikian:

Here we see the common humanity and equal value of a woman and a man before God. It is this image which makes man (female and male) God's representative on earth. Wenham (1987:78) states, "The image of God refers to the mental and spiritual faculties that man shares with his [sic!] Creator ... the image of God resides in man's reason, personality, free will, self-consciousness, or intelligence." It is further evident that "Women and men together share the imago Dei, and this divine image is a social reality. We can conclude that considerations such as these suggest that God intends for women and men to serve together in all aspects of church life" (Grenz & Kjesbo 1995: 174). Therefore, gender inequality was not part of the original good creation. Hence, these

<sup>19</sup> Dwi Riskawati and Oberlin Silalahi, "Implementasi Kebijakan Kuota Perempuan Di Parlemen Studi Kasus Di DPRD Kabupaten Sleman D. I. Yogyakarta," *Jurnal Enersia Publika*, 4 no. 3 (2020), 261-268; [https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal\\_Enersia\\_Publika/article/view/794](https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal_Enersia_Publika/article/view/794)

<sup>20</sup> Isti'anah Za and Ani Yunita, "Penguatan Kesadaran Politik Kaum Remaja Perempuan Melalui Kajian Regulasi Kuota 30% Perempuan di Lembaga Legislatif" *Jurnal Ummat* Vol. 6 No 1 (2022), 719-730. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/6603/pdf>.



considerations suggest that God intends for women and men to serve together in all aspects of church life including leadership. 21

Perjanjian Lama (PL) selanjutnya mengemukakan fakta bahwa terdapat pemimpin perempuan dalam seperti Deborah, Ester. Perjanjian Baru juga menekankan keberpihakan Yesus dan peran perempuan dalam perjalanan pelayanan Yesus, meskipun di sana-sini khususnya dalam tulisan Paulus, terdapat diskriminasi terhadap perempuan. Penekanan Paulus terkait kehadiran dan peran perempuan dalam jemaat yang terkesan diskriminatif dan tidak adil bagi gender perempuan, namun di bagian lain juga Paulus menekankan kesetaraan, misalnya dalam Roma 3:28. Dalam perkembangan kekristenan, bagian-bagian tertentu yang memperlakukan perempuan secara tidak adil dalam Alkitab inilah yang menjadi salah satu penyebab ketimpangan gender. Padahal jika ditelisik lebih jauh melalui beberapa metode hermeneutik, teks-teks yang tampaknya bias gender tersebut sesungguhnya adalah teks yang memiliki konteks tertentu.

Terhadap realitas perempuan dalam kekristenan, para ahli menemukan bukti kepemimpinan perempuan dalam Yudaisme dan kekristenan mula-mula. Perempuan dalam Yudaisme dan kekristenan mula-mula sesungguhnya telah berperan dalam jabatan gerejawi dan organisasi kegerejaan. Karen Jo Torjesen, misalnya mengemukakan,

Using funerary epitaphs and dedicatory inscriptions, Bernadette Brooten and Ross Kraemer have shown that women in Jewish community held a range of religious offices such as ruler of synagogue, mother of synagogue, elder, and priest, from the first century B.C.E to the sixth century C.E. Giorgio Otranto, an Italian professor of church history, has shown through papal letters and inscriptions that women participated in the Catholic priesthood for the first thousand years of church history. The last thirty years of American scholarship have produced an amazing range of evidence for women's roles as deacon, priests, presbyters, and bishop in Christian Church from the first through the thirteenth century.<sup>22</sup>

Pernyataan di atas mengetengahkan sejumlah bukti dimana perempuan telah memegang jabatan struktural di abad pertama, misalnya sebagai ketua synagoge (ibu synagoge), penatua, imam, bahkan berpartisipasi dalam jabatan imamat Katolik selama seribu tahun.

Saat ini, perempuan memang telah bisa sampai pada level manajer dalam setiap lingkup. Perempuan telah dapat menunjukkan kualitas baik dari segi pendidikan maupun kinerja, namun masih sulit untuk tiba pada posisi "top" pada setiap level kepemimpinan. Termasuk dalam kepemimpinan gereja. Fenomena ini menjadi menarik, ketika semua kran telah dibuka, namun ketika akan memilih atau menempati tingkat kepemimpinan yang lebih luas dalam setiap organisasi gereja maupun sosial, masyarakat atau umat sepertinya masih belum sepenuhnya rela atau percaya bahwa perempuan dapat memimpin di situ. Tidak hanya masyarakat secara umum, ketika perempuan sendiri pun diberi kesempatan, maka kadang masih belum percaya diri. Perempuan sepanjang zaman terbingkai dalam kondisi perspektif patriarkalis, menempatkannya pada kondisi *inferior complex*.

Terhadap kondisi ini menjadi jelas bahwa ada hambatan bagi perempuan untuk diterima dalam kepemimpinan yang lebih luas. Ada sesuatu yang tidak terlihat yang menjadi penghalang tersembunyi, yang dalam istilah sosiologis disebut *glass ceiling*, atau langit-langit kaca. Jadi, meskipun secara biblis teologis, regulasi gereja dan pemerintah jelas memperlihatkan upaya mewujudkan kesetaraan gender, namun masih saja sulit mewujudkan keseta-

---

<sup>21</sup> Mary L Kategile, "The Bible and Gender Equality in Church Leadership in Tanzania," *Stellenbosch Theological Journal* 6, no. 1 (August 28, 2020), accessed January 2, 2023, <https://ojs.reformedjournals.co.za/stj/article/view/2079>.

<sup>22</sup> Karen Jo Torjesen, *When Women, Where Priests: Women's Leadership in The Early Church & The Scandal of Their Subordination in The Rise of Christianity* (San Fransisco: Harper Colin Publisher, 1995).19.

raan gender dalam berbagai aspek. Dalam bingkai keterwakilan perempuan di Parlemen menjadi gambaran ketimpangan gender. Jangankan setara, 30% saja sulit tercapai. Sekali lagi ada hambatan tidak terlihat yang menghalangi Perempuan menjadi pemimpin di lingkup yang lebih luas, misalnya menjadi ketua sinode.

*Glass Ceiling* secara harafiah dapat diartikan sebagai langit-langit kaca. Menurut Linda Wirth istilah ini menggambarkan penghalang buatan yang tak terlihat.<sup>23</sup> Disebut penghalang buatan karena semestinya penghalang itu tidak ada dan walaupun ada bisa diretas. Ronald Burke mendefinisikan *glass ceiling* sebagai yang membatasi karir perempuan untuk mencapai posisi yang lebih tinggi.<sup>24</sup> *Glass ceiling* dapat berasal dari sisi perempuan itu sendiri, dan masyarakat tentunya. Lama sekali perempuan dibingkai dalam perspektif patriarkalisme. Perempuan masih banyak mengalami *inferiority complex*. Suatu perasaan inferior atau minder, merasa tidak mampu, dan itu berlangsung terus-menerus. Apalagi ketika berbicara soal pekerjaan rumah dan membesarkan anak. Sisi lainnya adalah pandangan umum terhadap perempuan itu sendiri. Senyatanya, masyarakat kita masih “belum rela” memberi “ruang publik” pada perempuan, melainkan pada ruang domestik 3UR, “dapur”, “kasur” dan “sumur”. Perkara-perkara di atas inilah yang merupakan *glass ceiling*, atau hambatan bagi perempuan untuk menjadi pimpinan di lingkup yang lebih luas. *Glass Ceiling* biasanya terjadi di tempat kerja dan dunia politik sebagai cerminan dari ketidaksetaraan sosial dan ekonomi gender. Jadi masih ada hambatan yang tidak terlihat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan. Prasangka dan *inferiority of complex* itu sebagai imbas dari ideologi patriarkar yang telah menubuh dalam masyarakat dan gereja.

Apa yang tergambar dalam masyarakat terkait hambatan tersembunyi atau *glass ceilings*, juga tergambar dalam gereja. Pola hambatan tak terlihat dalam kehidupan sosial masyarakat, nampak dalam kepemimpinan gereja. Meskipun Alkitab berbicara banyak mengenai perempuan yang memimpin dan kepemimpinannya yang berdampak seperti Deborah, Miriam, itu tidak serta merta membuat masyarakat dan gereja yang di dalamnya perempuan juga ada, dapat memecahkan hambatan tersebut. Kondisi ini tentu membutuhkan upaya lebih jauh untuk mencapai cita-cita kesetaraan gender yang dimaksud.

## Literasi, Afirmasi, dan Keberpihakan

Terhadap realitas di atas, pemerintah terus mengupayakan terwujudnya kesetaraan gender. Pemerintahan Jokowi memfokuskan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang salah satunya adalah peningkatan SDM perempuan. Pemerintah Jokowi mengusung strategi pengarusutamaan gender dalam delapan upaya berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000, sebagai jalan menuju kesetaraan. Delapan upaya pemerintah itu ialah: Peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik, pemerintahan dan pembangunan; Menguatkan perencanaan dan penganggaran responsive gender; Meningkatkan akses perempuan/ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi, terutama untuk menurunkan angka kematian ibu; Meningkatkan akses anak-anak perempuan untuk memperoleh pendidikan; Memfasilitasi peran perempuan/Ibu dalam pengutan ekonomi keluarga; Memfasilitasi perempuan untuk memperoleh akses teknologi pembiayaan dan pendampingan inovasi, termasuk merintis usaha dan menjadi wirausahawan; meningkatkan perlindungan terhadap pe-

<sup>23</sup> Linda Wirth, *Breaking Through the Glass Ceiling: Women in Management*. (Geneva: International Labour Office, 2001). 1.

<sup>24</sup> Deborah A. O’Neil and Diana Bilimoria, “Women’s Career Development Phases,” ed. Ronald Burke and Susan Vinnicombe, *Career Development International* 10, no. 3 (January 1, 2005): 168–189, accessed August 19, 2024, <https://doi.org/10.1108/13620430510598300>.

rempuan dari segala bentuk kekerasan dan tindakan diskriminatif; meningkatkan pelibatan perempuan/ibu dalam menjaga tumbuh kembang anak serta Pendidikan karakter dalam keluarga.<sup>25</sup>

Dari sudut teologis, upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meretas *glass ceiling* dalam gereja dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Sebuah penelitian mengemukakan perlunya revitalisasi panggilan misioner gereja dari misi tradisional ke misi universal misi penciptaan perlu dilakukan.<sup>26</sup> Misi penciptaan di sini menurut Tangirerung adalah misi Allah terhadap perempuan dan laki-laki yang setara untuk bersama-sama mengangkat tugas dan tanggungjawab yang diembankan sejak penciptaan. Dalam konteks kepemimpinan dalam gereja, di mana perempuan masih mengalami hambatan tersembunyi, maka revitalisasi yang dimaksud adalah menempatkan kembali fungsi dan peran perempuan dan laki-laki dalam kesetaraan sebagai pengemban mandat ilahi. Implikasi revitalisasi panggilan misioner gereja tersebut tentu akan berdampak pada seluruh kehidupan bergereja yaitu misalnya revitalisasi teologis di semua aras pelayanan dan program dalam pengarusutamaan perspektif gender dalam bergereja; revitalisasi struktural melalui formasi perempuan dalam proses pendidikan sampai pada pemetaan SDM di semua lingkup pelayanan; revitalisasi rekrutmen, dimana diharapkan ada kesadaran pemimpin sebagai bentuk afirmasi dan *political will* untuk mencapai kesetaraan gender di dalam gereja secara khusus kepemimpinan.

Dunia Pendidikan seyogianya menjadi ruang embrio pembentukan kesetaraan melalui literasi. Syarif Bando, Kepala Perpustakaan Nasional mengatakan, "Literasi tidak sekadar gemar membaca. Literasi tidak hanya sekadar mengeja huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraph, tetapi sampai pada tingkat inovasi dan produksi barang, penegetahuan dan nilai."<sup>27</sup> Selanjutnya, Bando mengatakan ada lima tingkat literasi yaitu mengenal baca tulis hitung dan karakter, kemampuan mengakses kepada ilmu pengetahuan terbaru, kemampuan memahami yang tersirat dari yang tersurat, melahirkan inovasi dan kreativitas, dan kemampuan memproduksi barang dan jasa. Literasi menjadi sebuah upaya pembebasan manusia dari ketidaktahuan, ketidakpahaman menjadi tahu dan paham. Sekaitan dengan masalah ketidaksetaraan dalam struktur kepemimpinan, maka ketika masyarakat paham dan tahu realitas dan tercerahi oleh ralitas tidak adil baik di tengah masyarakat maupun gereja, seyogianya tidak akan terjadi. Sejalan dengan itu, Paulo Freire mengatakan pendidikan adalah proses pembebasan dari berbagai ketertindasan.<sup>28</sup>

Selama ini proses Pendidikan masih masih dalam bingkai penindasan yang dia istilahkan sebagai sistem bank, dimana ruang gerak yang disediakan bagi murid hanya terbatas pada menerima, mencatat dan menyimpan.<sup>29</sup> Sebagai sistem bank, maka murid dilihat obyek atau sebagai deposit, sementara guru adalah subyek pendidikan. Murid menerima saja pemikiran guru tanpa ada ruang untuk berpikir berbeda sebagai hasil kreatifitas dan imajinasi. Inilah yang disebut Freire sebagai penindasan terselubung terhadap kreatifitas murid. Menurut

---

<sup>25</sup> Arimbi Heroepoetri, "Memahami Visi-Misi Jokowi Tentang Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan," *PKP Berdikari UGM* (Yogyakarta, March 26, 2018), accessed May 23, 2024, <https://www.pkpberdikari.id/artikel/opini/memahami-visi-misi-jokowi-dalam-bidang-kesetaraan-gender-dan-pemberdayaan-perempuan>.

<sup>26</sup> Tangirerung, "Studi Teologi Feminis atas Peran dan Kedudukan Perempuan Pendeta..." 173-179

<sup>27</sup> Sekar Gandhawangi, "Perpustakaan Berperan Tingkatkan Literasi Masyarakat" (Jakarta, Oktober 10, 2021), accessed May 27, 2024, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/11/10/perpustakaan-berperan-tingkatkan-literasi-masyarakat/>.

<sup>28</sup> Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, 7th ed. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2011).

<sup>29</sup> Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*. 52.

Paulo Freire, pendidikan kaum tertindas sebagai pendidikan para humanis dan pembebas, terdiri dari dua tahap:

Pada tahap pertama, kaum tertindas membuka tabir dunia penindasan dan melalui praksis melibatkan diri untuk mengadakan perubahan. Pada tahap kedua, dimana realitas penindasan itu sudah berubah, pendidikan ini tidak lagi menjadi milik kaum tertindas tetapi menjadi pendidikan untuk seluruh manusia dalam proses mencapai kebebasan yang langgeng.<sup>30</sup>

Kesimpulan dari dua tahap tersebut ialah agar penindas tidak menjadi penindas. Perjuangan kaum tertindas harus dilengkapi dengan paradigma kemanusiaan dan keadilan melalui proses penyadaran. Nilai-nilai kemanusiaan harus dikembangkan dalam pendidikan agar pendidikan membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan membudayakan nilai-nilai kemanusiaan.

Pertanyaan mendasar dalam hal ini ialah, “siapakah penindas dan yang tertindas? Penindas bisa saja person, sistem, lembaga bahkan lembaga Pendidikan itu sendiri dan kegamaan yang melakukan dehumanisasi. Penindasan terjadi setiap kali seseorang menjalankan otoritas (person, sistem dan lembaga) dengan cara sepihak, tidak adil, kasar, kejam tanpa mempedulikan kebebasan pihak lain, menggeser mereka pada titik pinggir (margin). Orang lemah atau kaum tertindas dalam masyarakat adalah orang miskin, minoritas, disabilitas, anak dan perempuan. Freire dalam menjawab persoalan pendidikan kaum tertindas adalah menawarkan sebuah model, dimana setiap orang memiliki sumber daya yang dapat dikembangkan. Guru berperan menunjukkan atau menemukan kekuatan setiap murid. Untuk itu dibutuhkan dialog, dimana setiap person memiliki sesuatu untuk didialogkan. Model Pendidikan yang ditawarkan Freire adalah “pendidikan dialogis”.

Sekaitan dengan ketimpangan gender yang terjadi dalam gereja dan masyarakat, maka model pendidikan dialogis. Untuk bisa setara maka yang harus terjadi adalah pemahaman atau kesadaran akan kesetaraan. Selama ini gereja dan masyarakat berada dalam sistem pendidikan bank, yang hanya menerima, mencatat dan menyimpan, baik ajaran, dogma dan ideologi yang sudah ada, dan parahnya para pemimpin yang berfungsi sebagai pemimpin, guru, pencerah, juga hanya melanjutkan tradisi dan pemikiran ideologi patriarkar. Idealnya adalah para pemimpin, dalam hal ini juga guru, tokoh agama, melakukan dialog terhadap kaum tertindas dalam hal ini perempuan untuk mengetahui potensi dan kemampuannya untuk berpartisipasi dalam gereja dan masyarakat.

Perempuan dalam konteks misi gereja setara dan sepotensi dengan laki-laki untuk menjalankan fungsi pembebasan. Jika ketimpangan gender masih dialami perempuan dalam gereja dan masyarakat, maka dapat dikatakan masih mengalami ketertindasan dan jika pendidikan menurut Paulo Freire adalah proses pembebasan, maka tepatlah jika pendidikan menjadi sebuah proses literasi menghasilkan inovasi, ilmu dan nilai-nilai yang baru, di mana masyarakat semakin terpahamkan dan menjadi pelaku kesetaraan dan keadilan gender.

## Kesimpulan

Ketimpangan gender baik yang diukur melalui Gender Inequality Index (GII) oleh UNDP maupun yang terlihat dalam gereja dan masyarakat terjadi dalam skala yang makin meningkat. Meskipun upaya legal formal dalam bentuk aturan, kebijakan pemerintah dan dalam bentuk peraturan gereja telah terumuskan dengan baik, namun toh ketimpangan gender itu masih tetap ada. Kondisi ini menempatkan perempuan dalam kepemimpinan dianalogikan dalam diksi sosologis sebagai *glass ceiling*, yaitu adanya sebuah hambatan yang tidak terlihat

---

<sup>30</sup> Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*. 27-28.

secara kasat mata dalam kehidupan sosial yang membuat perempuan sulit menjadi pemimpin di lingkup yang lebih luas sebagai “top leader”. Banyak perempuan yang sudah memperlihatkan kemampuan managerial dan *knowledge*-nya, namun ketika tiba pada pemilihan pemimpin, penolakan masih ada. Penolakan baik dari dalam perempuan itu sendiri, dan masyarakat pada umumnya. Pendidikan adalah kunci untuk membebaskan manusia dari penindasan. Ketimpangan gender adalah hasil dari sebuah ketidakadilan bagi perempuan yang begitu lama termarginalkan dalam status, hak dan peran. Gereja dan negara telah melakukan upaya pengarusutamaan gender, namun masih perlu upaya lain yang jauh lebih penting ialah literasi. Literasi bukan sekedar baca, tulis, dan hitung, tetapi sebuah proses pendidikan yang membebaskan untuk berpikir dan berkarya menghasilkan produk, ilmu dan nilai.

## Referensi

- Anggui, Andreas J. "Memburu Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki dalam Perjalanan Gereja Toraja" dalam *Bukan Gereja Laki-laki: Dua Puluh Lima Tahun Perempuan Pendeta Gereja Toraja (1986-2011)*. ed. Markus Rani, 23-26, Rantepao: Penerbit Lolo, 2011.
- Freire, Paulo. *Pendidikan Kaum Tertindas*. 7th ed. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2011.
- Gandhawangi, Sekar. "Perpustakaan Berperan Tingkatkan Literasi Masyarakat," Jakarta, Oktober 10, 2021. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/11/10/perpustakaan-berperan-tingkatkan-literasi-masyarakat/>.
- Heroepoetri, Arimbi. "Memahami Visi-Misi Jokowi Tentang Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan," *PKP Berdikari UGM*. Yogyakarta, March 26, 2018, <https://www.pkpberdikari.id/artikel/opini/memahami-visi-misi-jokowi-dalam-bidang-kesetaraan-gender-dan-pemberdayaan-perempuan>.
- Kategile, Mary L. "The Bible and Gender Equality in Church Leadership in Tanzania," *Stellenbosch Theological Journal* 6, no. 1 (August 28, 2020), <https://ojs.reformedjournals.co.za/stj/article/view/2079>
- Keener, Craig S. *Paul, Women & Wives: Marriage and Women's Ministry in The Letters of Paul*, Massachusetts: Hendrickson publishers, 1995.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02/Permen PPA/Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2020-2024*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240000/permen-pppa-no-6-tahun-2020>
- Kohm, Lynne Marie. "A Christian Perspective on Gender Equality," *Duke Journal of Gender Law & Policy* 15 (2008): 339–364.
- O'Neil, Deborah A., and Diana Bilimoria. "Women's Career Development Phases," Edited by Ronald Burke and Susan Vinnicombe, *Career Development International* 10, no. 3 <https://doi.org/10.1108/13620430510598300>. (January 1, 2005): 168–189.
- Riskawati, Dwi, and Oberlin Silalahi. "Implementasi Kebijakan Kuota Perempuan Di Parlemen Studi Kasus Di DPRD Kabupaten Sleman D. I. Yogyakarta," *Jurnal Enersia Publika* 4, no. 3 (2020), [https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal\\_Enersia\\_Publika/article/view/794261-268](https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal_Enersia_Publika/article/view/794261-268).
- Schottrof, Luise, Silva Schorer, and Marie-Theres Wacker. *Feminis Interpretation: The Bible in Women's Perspective*, Mineapolis: Fortress Press, 1999.
- Tangirerung, Johana Ruadjanna. "Studi Teologi Feminis atas Peran dan Kedudukan Perempuan Pendeta dalam Menyikapi Fenomena Glass Ceiling untuk Merevitalisasi Panggilan Misioner gereja Toraja," *Disertasi*, Sekolah Tinggi Theologi Cipanas, 2018.
- Tangirerung, Johana R., Selvi Panggua, and Dina Gasong, "Menemukan Nilai-nilai Kesetaraan Gender di balik Metafora Simbolik Rumah Adat 'Tongkonan' dan Lumbung 'Alang' Toraja," *Prosiding Seminar Nasional SMIPT 2020 Sinergitas Multidisiplin Ilmu*

- Pengetahuan dan Teknologi*, vol. 3, no. 1, (2020): 404-415.
- Torjesen, Karen Jo. *When Women, Where Priests: Women's Leadership in The Early Church & The Scandal of Their Subordination in The Rise of Christianity*, San-Fransisco: Harper Colin Publisher, 1995.
- Wiryono, Singgih and Bagus Santosa. "Komnas Perempuan: 34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2023," *Kompas.Com*. Jakarta, August 13, 2024; <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/05445101/komnas-perempuan-34682-perempuan-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-2024>.
- Wirth. Linda. *Breaking Through the Glass Ceiling: Women in Management*, Geneva: International Labour Office, 2001.
- Yolanda, Anne Mudya, Arisman Adnan, dan Azra Aulia Dwiputri. "Pemodelan Klasifikasi Pada Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Tahun 2020 Dengan Metode Naïve Bayes," *Jurnal Keluarga Berencana* 7, no.1 (2022): 22-31.
- Za, Isti'anah, and Ani Yunita. "Penguatan Kesadaran Politik Kaum Remaja Perempuan Melalui Kajian Regulasi Kuota 30% Perempuan Di Lembaga Legislatif," *Jurnal Ummat* 6, no. 1 (2022) 719–730. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/6603/pdf>.
- "Catatan Tahunan." *Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan..* <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>.
- Indeks Ketimpangan Gender dalam <https://katadata.co.id/investinginwomen>
- TEMPO. "Infografis Kekerasan Terhadap Perempuan," 2022. <https://grafis.tempo.co/>.
- United National Development Programme. *Gender Inequality Index*. Survey, 2022. <https://hdr.undp.org/data-center/thematic-composite-indices/gender-inequality-index#/indicies/GII>.